

Dinamika Kondisi dan Produktivitas Angkatan Kerja di Wilayah Desa Dengan Agroekosistem Sayuran

Conditions Dynamics and Productivity Labor Force in Rural Areas With Vegetables Agroecosystem

Bambang Winarso

Staf Peneliti di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian- Bogor.

Makalah disampaikan pada Seminar nasional Swasembada Pangan–Polinela–Lampung 2015

ABSTRACT

Workforce composed of the labor force and not the labor force. Group labor force comprised of working groups and the group does not/has not worked. Employment status is inseparable from the condition of life of the workers concerned. Criteria labor force age is an indicator that an area has the characteristics of young people or otherwise of an area characterized by old resident of each of these conditions would have implications for the policy to be taken. Employment conditions in the countryside with vegetable crops during the last three years has developed the greater the unemployment rate tends. This article is part of the research PATANAS (National Farmers Panel) conducted by the Centre for Socio-Economic and Agricultural Policy, Agricultural Research Agency. The survey was conducted in rural areas of Java and outside Java with dry land ecosystems agro-based vegetable conducted in 2008 and 2011.

Keywords : Productivity, labor force, vegetables, agroecosystem

Diterima: 10 April 2015, disetujui 24 April 2015

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bekisar pada sekurang-kurangnya empat macam ketidakseimbangan yang bersifat struktural. *Pertama*, terbatasnya lapangan kerja produktif dan tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja terutama kelompok angkatan kerja berusia muda yang menyebabkan kelebihan tenaga kerja. *Kedua*, penyebaran angkatan kerja secara geografis dalam hubungannya dengan penyebaran potensi sumber daya alam, khususnya tanah pertanian, mengakibatkan hambatan-hambatan dalam memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara optimal. *Ketiga*, masih adanya ketidak seimbangan di antara jenis dan jumlah tenaga yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah tenaga yang dihasilkan melalui sistem pendidikan dan latihan. *Keempat*, pasar kerja yang belum berfungsi sepenuhnya dalam menyalurkan tenaga kerja secara berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam upaya menghasilkan sebuah produk baik barang maupun jasa senantiasa membutuhkan faktor-faktor produksi baik bahan baku, bahan setengah jadi, teknologi, sarana dan prasarana penunjang maupun tenaga kerja. Tenaga kerja dapat ditampilkan dalam bentuk yang beragam diantaranya tenaga kerja

manusia, mesin, hewan, alam seperti angin dan faktor alam lainnya. Peranan tenaga kerja terutama tenaga kerja manusia sangat penting artinya bagi keberhasilan sebuah usaha untuk menghasilkan sebuah karya berupa barang maupun jasa.

Rusastra, dkk. (2005) mengemukakan bahwa unsur penting dari tenaga kerja manusia yang dapat menghasilkan pendapatan adalah keahlian dan tenaganya. Keahlian sebagai representasi kualitas tenaga kerja manusia biasanya diproksi dari tingkat pendidikan formal dan ketrampilan yang dimiliki. Bagi sebagian besar tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian unsur penting yang mereka miliki adalah tenaga. Dalam konteks ini tenaga kerja manusia memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani lewat banyaknya tenaga kerja manusia yang terlibat (dalam satuan orang) dan curahan kerjanya (dalam satuan jam ker per hari, hari kerja per minggu, per bulan, per tahun)

Fadilah (2012) juga mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah seluruh penduduk suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang dikaitkan dengan perdagangan diberbagai kegiatan atau usaha yang ada keterlibatan manusia yang dimaksud adalah keterlibatan unsur jasa atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber daya alam, modal, dan teknologi. Ditinjau dari segi umum pengertian tenaga kerja menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa dan mempunyai nilai ekonomi yang dapat beragam bagi kebutuhan masyarakat secara fisik kemampuan tenaga kerja diukur dari usia. Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap seorang laki-laki ataupun perempuan yang sedang mencari pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan balas jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Definisi tenaga kerja menurut Simanjuntak (1985) adalah penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan tidak bekerja (mencari pekerjaan). Sementara itu kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumahtangga dan golongan lain penerima pendapatan. Dalam beberapa hal mengenai konsep tenaga kerja menurut BPS, bahwa *persepsi angkatan kerja* didefinisikan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu sebelum pencacahan berstatus bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Sedangkan *persepsi partisipasi angkatan kerja* didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk, tingkat partisipasi kerja didefinisikan sebagai rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, kesempatan kerja merupakan rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran rasio jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk.

Secara kelembagaan, tenaga kerja yang bekerja di usahatani lahan kering atau tergalan dapat dibedakan antara tenaga manusia, alsintan dan tenaga hewan atau ternak. Penjual jasa tenaga kerja bisa merupakan perorangan atau kelompok yang umumnya tidak terorganisir. Kasus di desa sayuran, curahan tenaga kerja biasanya sangat intensif, mengingat masa tanam relatif singkat tergantung jenis komoditasnya. Sehingga kegiatan berburuh tani pada usahatani sayuran relatif kontinyu sepanjang tahun, hal ini terutama di temukan di Desa Margamulya dan Karang Tengah. Demikian juga halnya dengan kebutuhan tenaga kerja manusia untuk berbagai kegiatan usahatani (pengolahan lahan, tanam, pemeliharaan, dan panen) dapat dipenuhi dari ketersediaan tenaga kerja upahan di dalam desa dan dari luar desa. Tidak terdapat hubungan kerja secara khusus dalam pasar tenaga kerja pertanian di desa penelitian, dimana hubungan kerja bersifat lepas.

Jenis kegiatan pekerjaan yang umumnya membutuhkan curahan tenaga kerja di bidang usahatani meliputi beberapa kegiatan berkaitan dengan budidaya tanaman yang diusahakan. Secara umum ada beberapa jenis kegiatan utama yaitu kegiatan pengolahan lahan, kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, kegiatan panen dan kegiatan pasca panen. Dari semua kegiatan tersebut belum tentu setiap petani mampu mengerjakan sendiri mengandalkan tenaga yang ada dalam keluarganya. Solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam menggarap lahan tersebut adalah memanfaatkan jasa tenaga buruh tani.

Secara metodologis, kajian ini bertujuan melihat dinamika kondisi dan produktivitas tenaga kerja. Merupakan bagian dari hasil penelitian PATANAS (Panel Petani Nasional) yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Survei dilakukan pada wilayah pedesaan di Jawa dan luar Jawa dengan agro ekosistem lahan kering berbasis sayuran yang dilakukan pada tahun 2011 di tiga lokasi. Masing-masing di Desa Bendosari Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur, Desa Karang Tengah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dan Desa Margamulya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sementara di luar Jawa berlokasi di Desa Boaroko Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah responden di masing-masing desa di Jawa adalah 32 rumah tangga per desa, sedang responden di desa di luar Jawa sebanyak 25 orang per desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum “penduduk” ditempatkan sebagai (1) input produksi, dalam konteks menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi, dan (2) sebagai konsumen, karena menggunakan berbagai sumberdaya ekonomi, dan memiliki peran “menghabiskan” sumberdaya ekonomi yang tersedia. Padahal sumberdaya yang tersedia jumlahnya amat terbatas, dibanding jumlah penduduk yang terus meningkat. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagainya sebenarnya merupakan juga masalah kependudukan. Seperti yang dikemukakan oleh M. Yacob Surung dan Dahlan (2012) bahwa kemiskinan petani dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta sanitasi lingkungan yang buruk, ketiadaan sumberdaya lahan sawah milik sendiri, yang diperburuk oleh pengadaan dan distribusi pupuk/benih sulit diperoleh, produktivitas dan teknologi tani kurang intensif dilakukan, sehingga kualitas hasil panen terus menurun, menyebabkan pendapatan para petani rendah.

Hasil penelitian di beberapa desa contoh PATANAS 2011 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di desa yang berbasis komoditas sayuran secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang ditanggung kepala keluarga 4,3 jiwa/KK (2008). Sementara jumlah penduduk diatas usia 15 tahun lebih besar jumlahnya dibanding angkatan kerja dibawah 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi jumlah penduduk diatas 15 tahun merupakan sumber potensi tenaga kerja produktif untuk memenuhi pasar tenaga kerja di sector pertanian dan non pertanian. Rata-rata jumlah penduduk usia produktif untuk desa 74 persen. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah usia produktif (≥ 15 th) berkisar antara 71 persen.

Realisasi tentang kondisi ketenagakerjaan di pedesaan justru mengalami perkembangan yang cenderung semakin besar tingkat penganggurannya. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1.832 jiwa, 71,99 persen merupakan angkatan kerja usia produktif sementara yang benar-benar telah bekerja sekitar 57,17 persen. Sehingga angkatan kerja yang belum/tdk mendapat pekerjaan sebesar 12,82 persen. Disisi lain data pada tahun 2011 dari jumlah anggota rumahtangga sebanyak 386 jiwa, maka besarnya angkatan kerja secara prosentase 72,53 persen. Dimana dari jumlah tersebut tenaga kerja yang benar-benar bekerja sebesar 56,99 persen, sisanya sebesar 15,54 persen angkatan kerja menganggur. Dari keragaan angka prosentase tersebut di atas menunjukkan bahwa secara prosentase angka pengangguran meningkat, walau secara absolut tidak demikian.

Peranan Umur Terhadap Kinerja Tenaga Kerja

Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk. Pada wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial terutama untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penduduk usia <15 tahun (anak-anak). Pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, serta penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain.

Sebaliknya wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain. Informasi tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Disamping itu, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan. Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi menanggung beban penduduk yang belum produktif (<15 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif (65 tahun ke atas).

Angkatan Kerja Menurut Sumber Mata Pencapaian

Secara umum bagi sebagian besar penduduk di pedesaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bergantung pada satu sumber mata pencapaian saja. Akan tetapi dapat saja melakukan beberapa kegiatan yang ada di sektor pertanian dan non pertanian. Hal ini disamping untuk menambah penghasilan, maka cara tersebut diutamakan untuk memperkecil resiko terganggunya ekonomi rumah tangga. Semakin banyak variasi sumber pendapatan, berarti semakin besar income yang didapatkan dan akan semakin kokoh ekonomi rumah tangganya. Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sumber mata pencapaian utama berdasarkan besarnya pendapatan secara agregat didominasi oleh sumber mata pencapaian pada usaha pertanian 65,8 persen dan kegiatan berburuhtani 14,6 persen. Sedangkan pada tahun 2011, sumber matapencapaian utama pada usaha pertanian 66,0 persen dan kegiatan buruhtani 18,8 persen.

Usaha di sektor nonpertanian yang memiliki kontribusi terbesar (*agregat*) menyerap tenaga kerja di pedesaan adalah usaha perdagangan 6,3 persen yang terbesar adalah di desa Jawa Barat yaitu Desa Marga Mulya. Kontribusi mata pencapaian dari sebagian warga di desa ini lebih disebabkan karena lokasi desa tersebut merupakan wilayah desa wisata. Sehingga aktifitas perdagangan merupakan salah satu sumber matapencapaian bagi sebagian warganya. Besarnya kontribusi di sektor pertanian lebih banyak ditopang oleh besarnya angkatan kerja yang bekerja pada usaha pertanian utamanya berbasis sayuran yang pada periode tahun 2008 dapat mencapai 80 persen dari jumlah tenaga kerja. Beberapa desa yang mempunyai kontribusi di sektor pertanian yang terbesar desa Bendosari 82,5 persen, Karang Tengah 71,6 persen dan Baroko 68,5 persen. Sedangkan pada tahun 2011, kontribusi sektor pertanian terhadap sumber matapencapaian tetap lebih dominan 84,4 persen dibanding sektor diluar pertanian 15,6 persen. Desa yang memiliki kontribusi terbesar di sektor pertanian desa Bendosari 68,4 persen, Karang Tengah 7,5 persen dan Marga Mulya 65,7 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kesempatan angkatan kerja yang mengisi sumber mata pencapaian di luar sektor pertanian sangat kecil, dan akibat rendahnya mobilitas

angkatan kerja ke sumber pertumbuhan ekonomi dan akses ke pemerintahan, sehingga peluang kesempatan kerja sangat sulit dimasuki oleh angkatan kerja yang bekerja diluar sektor pertanian.

Tabel 1. Prosentase angkatan kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan di desa contoh

| No | Jenis Kegiatan | Desa | | | | Total |
|------|-------------------|------------|---------------|-------------|--------|-------|
| | | Bendo Sari | Karang Tengah | Marga Mulya | Baroko | |
| 2008 | | | | | | |
| 1 | Usaha Per-tanian | 82.5 | 71.6 | 33.1 | 68.5 | 65.8 |
| 2 | Buruh Per-tanian | 3.2 | 17.7 | 37.8 | 2.4 | 14.6 |
| 3 | Buruh Industri | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 1.0 |
| 4 | Dagang | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 5.5 | 6.3 |
| 5 | Pekerja Bangun-an | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.2 |
| 6 | Pekerja Jasa | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 1.9 |
| 7 | Usaha Industri | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 |
| 8 | Ang-kutan | 1.0 | 0.5 | 6.4 | 5.2 | 2.9 |
| 9 | Peg/tata-laksana | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 11.8 | 4.6 |
| 10 | Lainya | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 1.1 |
| 2011 | | | | | | |
| 1 | Usaha Per-tanian | 68,4 | 75,2 | 65,7 | 54,6 | 66 |
| 2 | Buruh Per-tanian | 20,4 | 13,2 | 14,7 | 26,8 | 18,8 |
| 3 | Buruh Industri | 1,3 | 0,9 | 3 | 2,3 | 1,9 |
| 4 | Dagang | 2,2 | 1,7 | 2 | 2,8 | 2,2 |
| 5 | Pekerja Bangun-an | 0 | 0,9 | 1 | 1,4 | 0,8 |
| 6 | Pekerja Jasa | 0,9 | 1,7 | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 7 | Usaha Industri | 4,9 | 2,6 | 7,9 | 3,7 | 4,8 |
| 8 | Ang-kutan | 0,4 | 2,1 | 2 | 5,1 | 2,4 |
| 9 | Peg/tata-laksana | 0 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| 10 | Lainya | 2,7 | 1,6 | 2 | 3 | 2,3 |

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa sumber mata pencaharian utama di pedesaan yang berperan adalah sektor pertanian, utamanya pada kegiatan usahatani dan berburuh tani dibanding bidang pekerjaan lainnya diluar sektor pertanian. Oleh karena itu dalam kegiatan program di pedesaan berbasis komoditas, perlu kiranya ada pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan produksi, serta meningkatkan keseimbangan peluang kerja di luar bidang produksi, maupun di luar sektor pertanian. Sedangkan pekerjaan diluar sektor pertanian yang dominan sangat bervariasi antar desa dengan berbagai sumber matapencaharian pada usaha non pertanian (dagang, usaha industri, pegawai tatalaksana, jasa, angkutan, pekerja bangunan dan buruh non pertanian, maupun sumber lainnya).

Bervariasinya sumber mata pencaharian dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang semakin terbuka, 2) sarana transportasi yang semakin lancar dan komunikasi yang semakin luas membuka peluang untuk akses bekerja diluar sektor pertanian ataupun diluar batas administrasi wilayah hingga ke luar negeri, 3) tingkat pendidikan atau keterampilan dari sebagian tenaga muda di pedesaan mendorong untuk bekerja di luar sektor pertanian dan 4) semakin terbatasnya kesempatan kerja dan pemilikan aset produktif yang semakin sempit akan membatasi pola usaha yang lebih produktif dibanding sektor non pertanian yang cenderung terbuka.

Sementara itu belum berkembangnya sumber matapencaharian di sektor non pertanian tentu berpengaruh terhadap kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang terbatas. Aktifitas pertanian masih

berorientasi peningkatan produk, sementara kegiatan yang mengarah ke agroindustri masih terbatas. Hal ini bisa disebabkan karena rendahnya sarana dan prasarana termasuk sarana perhubungan, komunikasi dan informasi terutama keterbatasan informasi pasar tenaga kerja sehingga pola migrasi dan mobilitas masyarakat sangat rendah. Seperti yang dikemukakan oleh Alisyahbana (2006) bahwa melihat sektor informal sebagai akibat dari daya dorong pedesaan dan daya tarik perkotaan. Banyaknya sektor informal diberbagai kota besar tidak lepas dari adanya urbanisasi dan daya dorong sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta tingkat upah yang sangat rendah di desa.

Kondisi angkatan kerja apabila dilihat berdasarkan status pekerjaan, dimana angkatan kerja menurut status pekerjaan dimaksudkan adalah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha rumahtangga, baik itu kegiatan usaha pertanian maupun nonpertanian. Apakah tenaga kerja tersebut sebagai tenaga kerja upahan, tenaga kerja keluarga atau kombinasi dari keduanya. Sedangkan angkatan kerja yang tidak bekerja adalah sebagian mereka yang termasuk sebagai ibu rumahtangga, anak yang sedang sekolah, angkatan kerja yang sedang menunggu/mencari kerja dan lanjut usia, pensiunan dan cacat/jompo. Seperti yang dikemukakan oleh Wirosuhardjo (2003) bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap curahan tenaga kerja, sebab pada dasarnya sumber daya manusia dimulai dari lingkungan keluarga. Apabila tidak ada pengembangan sumber daya manusia, berarti tidak ada usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bekerja. Jumlah anggota keluarga akan menentukan tingkat curahan jam kerja dan hasil yang dikerjakan.

Manning (2001) mengemukakan bahwa sebagian besar (63%) tenaga kerja yang ada di Indonesia bergerak di sektor informal. Dalam kajian ini status pekerjaan di pedesaan diklasifikasikan berdasarkan lima status yaitu (a) usaha dengan buruh upahan, dimana untuk melakukan kegiatan usaha, maka yang bersangkutan tidak bisa hanya mengandalkan tenaga keluarga, melainkan harus dibantu oleh tenaga luar keluarga dengan sistem upah. (b) Usaha dimana dalam kegiatannya cukup dikerjakan dengan tenaga yang ada dalam keluarga. (c) Usaha dengan hanya mengandalkan tenaga kerja seorang diri yang ada dalam keluarga tersebut. (d) Bekerja sebagai buruh upahan, artinya yang bersangkutan bisa bekerja kalau ada yang membutuhkan dan mendapat imbalan upah sebagai buruh. Seperti yang dikemukakan oleh Guus Heerma van Voss (2012) bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja/buruh dan (e) status pekerja campuran diantara ke empat jenis status tersebut.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengelompokan angkatan kerja yang bekerja berdasarkan status pekerjaan di pedesaan berturut-turut adalah status pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja upahan sebesar 10 persen. Sementara usaha dengan memanfaatkan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 40 persen dan sebagai tenaga kerja buruh 28 persen serta campuran dari ketiga status tersebut 15 persen. Pada kelompok buruh upahan adalah mereka yang memerlukan insentif dalam bentuk upah kerja, serta ketersediaannya merupakan potensi tenaga kerja yang kurang mampu bersaing di pasar tenaga kerja dengan kepemilikan lahan sempit (*landless*) atau tidak memiliki lahan (*tuna kisma*). Konsekuensinya akan menjadi beban yang berat, bila tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja diluar sektor pertanian.

Seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2011) bahwa alih kepemilikan lahan menyebabkan lahirnya istilah siapa yang “menguasai” lahan dan siapa yang “mengusahakan” lahan. Mereka yang menguasai lahan adalah bisa saja bukan petani. Sementara Supadi dan Susilowati, (2004) mengemukakan bahwa tingkat ketimpangan distribusi penguasaan lahan relatif lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan distribusi pemilikan lahan karena berkembangnya kelembagaan penguasaan lahan. Sementara menurut Nurmanaf (2001), di pedesaan berbasis pertanian ketidakmerataan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan ketidakmerataan penguasaan lahan pertanian.

Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang bekerja maka semakin positif dampaknya terhadap kehidupan sosial

ekonomi suatu wilayah. Dengan semakin banyak penduduk yang bekerja dan sedikit penduduk yang menganggur, pemerintah akan semakin ringan dalam menangani masalah penyerapan tenaga kerja. Peran penduduk akan menjadi modal dasar pembangunan bila diupayakan dengan baik, sebaliknya akan menjadi beban yang berat bila tidak diberdayakan dengan baik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran ketenagakerjaan yang banyak digunakan. Pengukuran TPAK dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh tenaga kerja yang bekerja dibagi dengan absolut seluruh angkatan kerja kemudian dikalikan 100. Jika TPAK 75 persen. Artinya dalam setiap 100 orang tenaga kerja terdapat 75 orang angkatan kerja yang bekerja. Berdasarkan TPAK kita dapat melakukan perkiraan, berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan angkatan kerja tanpa diikuti dengan TPAK, akan menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi dan pada gilirannya menghambat jalannya pembangunan.

Tingginya TPAK pedesaan, paling tidak dapat ditafsirkan dari dua sisi. *Pertama*, kemungkinan etos kerja masyarakat di pedesaan memang tinggi, sehingga mereka kebanyakan bergiat dalam aktivitas ekonomi. *Kedua*, bisa pula mereka masuk ke dunia kerja karena terpaksa, akibat adanya himpitan kehidupan yang begitu kuat, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja agar dapat bertahan hidup. Sedangkan tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa pemanfaat peluang kerja menurut sumber matapencarian yang ada belum diupayakan secara optimal atau dengan perkataan lain belum ada kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh angkatan kerja. Yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi anggota rumah tangga yang bekerja. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran diantaranya adalah tingginya tingkat aksesibilitas desa terhadap sumber pertumbuhan ekonomi dan peranan sarana prasarana dan transportasi yang merupakan sarana publik yang mempermudah untuk menjangkau keberbagai sumber matapencarian di pertanian dan non pertanian.

Fasilitas publik yang dimaksudkan disini adalah sarana dan prasarana yang memiliki fungsi meningkatkan aksesibilitas wilayah. Fasilitas publik dengan fungsi seperti ini adalah jalan baik jalan desa, antar desa, desa-ibukota kecamatan maupun jalan ibukota kecamatan-ibukota kabupaten, sarana angkutan dan pasar. Keberadaan fasilitas publik ini berguna untuk memperlancar arus pengadaan dan penjualan barang dan meningkatkan mobilitas penduduk. Nurmanaf (2002), mengemukakan bahwadengan aksesibilitas yang baik, sektor di luar pertanian lebih dominan dalam kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani berlahan sempit. Fasilitas publik juga dapat memperlancar proses kegiatan usahatani seperti adanya jaringan irigasi dan jalan usahatani.

Keberadaan fasilitas publik ini berguna untuk meningkatkan produktivitas dan memperlancar distribusi input dan penjualan hasil produksi. Keberadaan fasilitas publik dengan fungsi meningkatkan aksesibilitas wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan di luar sektor pertanian, sedangkan keberadaan fasilitas publik dengan fungsi memperlancar proses kegiatan usahatani lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan sektor pertanian. Dengan perkataan lain keberadaan fasilitas publik dipengaruhi baik oleh kebijakan dan program pembangunan sektor pertanian maupun sektor di luar pertanian. Hasil pengamatan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tingkat partisipasi kerja di pedesaan berbasis sayuran sebesar 79,46 persen. Sedangkan pada tahun 2011, tingkat partisipasi kerja lebih tinggi 77,19 persen. Ada tendensi penurunan tingkat partisipasi kerja oleh angkatan kerja. Kondisi yang demikian tentu perlu mendapat perhatian, bahwa prosentase tingkat partisipasi kerja yang menurun setidaknya akan berimplikasi terhadap semakin tingginya angka pengangguran.

Rendahnya tingkat partisipasi kerja salah satunya juga bisa disebabkan oleh semakin terbatasnya peluang kerja di sektor pertanian. Munculnya teknologi baru terutama dengan semakin berkembangnya sistem mekanisasi pertanian baik dalam kegiatan pengolahan lahan, penanaman tanaman maupun dalam pemeliharaan tanaman akan berdampak terhadap semakin terbatasnya peluang kerja. Tenaga kerja yang

tidak memiliki ketrampilan baru dalam sistem mekanisasi pertanian yang baru, maka akan tergeser perannya dalam perebutan peluang kerja tersebut yang akhirnya akan mencari kesempatan kerja yang baru yang sesuai dengan keterampilannya. Seperti yang dikemukakan oleh Kamaluddin, (1999), bahwa pada saat ini penggunaan teknologi pertanian khususnya teknologi biologis maupun kimiawi sudah pada taraf relatif intensif.

Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Idealnya, tenaga kerja yang tersedia memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, namun biasanya sering terjadi *mismatch* antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuninya, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya formal. Pendidikan tenaga kerja, sering diukur dengan proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan.

Berkaitan dengan tenaga kerja manusia, kebijakan dan program pembangunan sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian akan berpengaruh baik terhadap kualitas (tingkat pendidikan formal dan ketrampilan), banyaknya tenaga kerja yang terlibat maupun terhadap curahan kerja. Tingkat pendidikan formal tenaga kerja manusia lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan di luar sektor pertanian (dalam hal ini Kementerian Pendidikan nasional). Sedangkan ketrampilan tenaga kerja manusia khususnya yang terlibat di sektor pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan sektor pertanian lewat kegiatan-kegiatan pelatihan, sekolah lapang maupun penyuluhan. Sementara itu banyaknya tenaga kerja yang terlibat maupun curahan kerjanya sangat dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang diciptakan oleh kebijakan dan program pembangunan baik di sektor pertanian maupun di diluar sektor pertanian.

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum jumlah angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan perkembangan positif terutama angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Angkatan kerja yang telah tamat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan, sementara angkatan kerja yang mampu selesai sampai tingkat Sekolah Menengah Atas mengalami pengurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja di pedesaan sayuran yang putus sekolah hanya sampai di lanjutan tingkat pertama cukup tinggi.

Tingginya proporsi tingkat pendidikan SD kebawah kemungkinan karena masyarakat pedesaan belum begitu mamahami arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Hal ini memberikan sinyal bahwa masih perlu banyak lagi pembangunan sarana pendidikan setingkat SMP di wilayah pedesaan, sehingga para lulusan SD yang ingin melanjutkan ke SMP tidak perlu lagi pergi ke kota. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan menjadi tidak terlampau mahal, dan secara ekonomi menjadi terjangkau oleh orang tua di pedesaan yang menginginkan anaknya meraih pendidikan yang lebih baik.

Walaupun struktur pendidikan tenaga kerja pedesaan ini nampak sudah mulai membaik, namun jika melihat mereka yang berkualifikasi pendidikan SMA, baik itu umum maupun kejuruan, tingkat diploma, serta mereka yang telah meraih pendidikan sarjana, angkanya masih terlihat tidak seimbang. Tingkat pendidikan sarjana, secara keseluruhan proporsi tenaga kerja pedesaan hanya sekitar 1-3 persen saja dibandingkan tenaga kerja yang berpendidikan dibawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan angkatan kerja untuk pendidikan yang rendah akan menjadi kurang mampu bersaing di pasar tenaga kerja yang memerlukan wawasan dan pendidikan yang lebih tinggi.

Walaupun telah ada perbaikan struktur pendidikan terhadap tenaga kerja pedesaan, akan tetapi masih perlu upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat secara umum kebanyakan masyarakat pedesaan masih terjerat kemiskinan. Kebijakan pendidikan gratis, atau paling tidak kebijakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, serta dapat terjangkau oleh masyarakat di pedesaan sangat perlu

untuk segera diupayakan. Jumlah terbesar angkatan kerja di sektor pertanian mengelompok pada tingkat pendidikan SD yaitu 53 persen. Dari jumlah tersebut yang bergerak diluar bidang pertanian 10 persen

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan Patanas, 2008 dan 2011

| Basis Komoditas/ Desa | Sektor Pertanian | | | | | | Sektor Non Pertanian | | | | | | Jumlah | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | S/d Tamat SD | Tdk Tamat SMP | Tamat SMP | Tidak Tamat SMA | Tamat SMA | Dipl/ PT | S/d Tamat SD | Tdk Tamat SMP | Tamat SMP | Tidak Tamat SMA | Tamat SMA | Dipl/ PT | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bendosari | 68,0 | 1,3 | 14,7 | 0,0 | 5,3 | 1,3 | 90,7 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 9,3 |
| 2. K. Tengah | 75,0 | 1,3 | 7,9 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 86,8 | 7,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 13,2 |
| 3. M. Mulya | 43,3 | 0,0 | 17,9 | 1,5 | 11,9 | 0,0 | 74,6 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 1,5 | 7,5 | 3,0 | 25,4 |
| 4. Baroko | 26,4 | 4,2 | 6,9 | 1,4 | 20,8 | 1,4 | 61,1 | 4,2 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 9,7 | 15,3 | 38,9 |
| Total | 53,2 | 1,7 | 11,9 | 0,7 | 10,2 | 0,7 | 78,3 | 5,9 | 0,7 | 3,5 | 1,1 | 5,0 | 5,6 | 21,7 |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bendosari | 69.1 | 1.7 | 10.2 | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 85.8 | 7.2 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 14.2 |
| 2. K. Tengah | 74.0 | 0.5 | 8.6 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 89.3 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 10.7 |
| 3. M. Mulya | 44.8 | 1.0 | 18.7 | 0.3 | 5.4 | 0.7 | 70.9 | 14.0 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 5.4 | 1.3 | 29.1 |
| 4. Baroko | 29.1 | 0.7 | 15.2 | 1.4 | 21.5 | 3.1 | 70.9 | 2.1 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | 10.0 | 11.4 | 29.1 |
| Total | 56.7 | 1.0 | 12.7 | 2.0 | 6.8 | 1.2 | 80.4 | 7.5 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 19.6 |

Sumber : Data primer (diolah)

Produktivitas Kerja

Indikator tidak langsung tingkat pendapatan rumah tangga (sebagai representasi tingkat kesejahteraan) yang berkaitan dengan tenaga kerja adalah produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Produktivitas tenaga kerja diukur dari pendapatan total yang diperoleh dari seluruh jenis kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian selalu lebih kecil daripada produktivitas tenaga kerja di luar sektor pertanian. Apabila produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian relatif rendah maka secara tidak langsung akan diperoleh gambaran bahwa tingkat pendapatan rumah tangga di sektor pertanian juga akan relatif rendah. Tingkat pengangguran diukur dari banyaknya anggota rumah tangga yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan.

Apabila tingkat pengangguran di sektor pertanian relatif tinggi maka secara tidak langsung akan diperoleh gambaran bahwa tingkat pendapatan rumah tangga di sektor pertanian secara rata-rata akan relatif rendah. Hasil penelitian Haslinah (2011) menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi dan demografi terhadap produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Produktivitas merupakan kemampuan tenaga kerja dalam memproduksi yang biasanya dinilai dari satuan hitung yang dibutuhkan.

Pengukuran produktivitas tenaga kerja tetap diperlukan untuk melakukan estimasi biaya upah pada perhitungan harga satuan pekerjaan. Secara umum definisi produktivitas adalah rasio antara input dan output. Pada proses perhitungannya perlu dideskripsikan dengan jelas pengertian input dan output yang dimaksud. Untuk produktivitas tenaga kerja pengertian input diekspresikan sebagai orang jam(OJ) atau orang-hari (OH). Sedangkan output adalah kuantitas hasil kerja yang satuannya bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang diukur. Hasil pengamatan dilapangan berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja rumahtangga yang bekerja sebagai buruh tani secara rata-rata Rp 25 ribu/HOK. Jenis kegiatan buruh pertanian seperti nyangkul, menanam, menyang, panen dan pasca panen. Sementara produktivitas tenaga kerja rumahtangga dalam aktivitas berburuh non pertanian adalah seperti kegiatan sebagai tukang bangunan, buruh bangunan, jasa angkutan, buruh jasa, buruh dagang, dan penjaga toko, rata-rata produktivitas tenaga kerja lebih tinggi yaitu Rp 41 ribu/HOK

Harga Upah

Implikasi dari besarnya ketersediaan tenaga kerja buruh tani di pedesaan adalah besarnya posisi tawar dari tenaga kerja yang ada sehingga hal ini akan menyebabkan rendahnya upah buruh tani. Terdapat indikasi posisi tenaga kerja upahan semakin menguat yang ditunjukkan oleh adanya perkumpulan tenaga kerja buruh tani (khususnya tenaga kerja wanita) dan tingkat upah yang terus mengalami peningkatan. Permasalahannya bahwa terkadang dalam urusan rumah tangga sebagian wanita justru berperan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi yang demikian maka dalam hal kegiatan buruh tani, maka peran wanita menjadi sangat penting manakala dalam keluarga tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

Seperti yang dikemukakan oleh Suryaningsih (2012) bahwa tanggungjawab perempuan terhadap keluarga telah mengalami pergeseran, perempuan ikut serta dalam memperhatikan kesejahteraan keluarga. Ekonomi keluarga tidak lagi menjadi tanggungjawab laki-laki atau suami tetapi telah dibagi menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Akan tetapi apabila peran wanita terkesampingkan dalam memanfaatkan peluang kerja di pedesaan maka akan memunculkan persoalan baru. Persoalan pergeseran peluang kerja laki-laki menjadi lebih besar daripada peluang tenaga kerja perempuan dapat memicu semakin meningkatnya perempuan yang mencari peluang lain yaitu mencari pekerjaan ke luar negeri. Hal ini salah satu sebabnya adalah sebagai akibat dari telah bergesernya peluang kerja di daerah asal. Pergeseran peluang kerja di daerah asal disebabkan telah terjadinya pergeseran-pergeseran dalam kegiatan pertanian dalam hal penggunaan teknologi pertanian. Akibat dari penggunaan teknologi pertanian membuat buruh tani perempuan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang selama ini menjadi bagian pekerjaan mereka. Perekrutan tenaga kerja sebagai buruh tani menjadi lebih banyak dilakukan kepada laki-laki. Kasus di desa contoh wilayah sayuran menunjukkan bahwa besarnya upah buruh tani di desa Karang Tengah, desa Margamulya dan Desa Bendosari pada tahun 2011 berkisar Rp 15.000 s/d Rp 30.000 per hari dibandingkan nilai upah tahun 2008 yang berkisar Rp 10.000 s/d Rp 20.000 per hari. Ini berarti ada kenaikan sedikit secara absolut, walaupun secara riil belum tentu meningkat, terutama upah tenaga kerja pria dalam kegiatan mencangkul, hal ini dimungkinkan karena semakin langkanya tenaga kerja yang disebabkan karena keengganan tenaga kerja muda untuk terjun ke pertanian.

Untuk mengatasi masalah tersebut seyogyanya perlu upaya agar kegiatan berburuh tani tetap menjadi daya tarik bagi warga desa. Solusi melalui perbaikan upah atau melalui kesepakatan adanya upah minimum tampaknya dapat diharapkan dapat menjadi solusi kelangkaan tenaga kerja tersebut. Edy Priyono (2002) mengemukakan bahwa kebijakan upah termasuk di dalamnya kebijakan upah minimum, tampaknya perlu dipertimbangkan terutama dilihat dari sisi kepentingan buruh dan pengusaha secara bersama-sama. Dalam konteks ini, upah yang "adil" bukanlah upah yang menjamin buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan upah yang tepat sama dengan kontribusi buruh terhadap perusahaan atau produktivitasnya.

Harga berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga petani (dalam hal ini pendapatan dari usahatani) lewat perubahan harga hasil produksi maupun perubahan harga sarana produksi. Sementara itu pengaruh upah tenaga kerja di sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga petani adalah lewat perubahan ongkos tenaga kerja. Kecuali harga gabah atau beras, harga komoditas pertanian lainnya praktis tidak dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah karena penentuan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar. Demikian pula untuk upah tenaga kerja di sektor pertanian penentuan tingkat upah juga diserahkan kepada mekanisme pasar. Indikator tidak langsung tingkat pendapatan rumah tangga berkaitan dengan harga adalah inflasi, dimana inflasi menyangkut kenaikan harga-harga secara umum. Apabila inflasi mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat termasuk rumah tangga petani akan turun dan konsekuensinya tingkat kesejahteraan rumah tangga petani juga akan turun.

Secara umumnya biaya tenaga kerja upahan dibayar dengan sistem tunai untuk berbagai jenis kegiatan usaha tani baik untuk kegiatan pengolahan lahan, tanam maupun pemeliharaan tanaman. Kebutuhan pendapatan secara tunai untuk memenuhi ekonomi rumah tangga merupakan hal yang sangat

penting, sehingga kecil kemungkinannya semua kegiatan dibayar setelah panen. Sementara di kasus di lapangan terutama di desa dengan wilayah basis sayuran, upah dapat dibayarkan dalam jangka waktu mingguan, dua mingguan atau bahkan bulanan. Akan tetapi pada saat buruh membutuhkannya, maka bisa meminjam lebih dulu ke majikannya. Sulitnya mencari tenaga kerja di pedesaan menyebabkan petani pemilik lahan terutama petani lahan luas cenderung mengikat buruh dengan sistem pembayaran dimuka walaupun status pembayarannya sebenarnya mingguan atau bulanan.

KESIMPULAN

Selama periode tiga tahun terakhir (2008–2011) kondisi ketenagakerjaan di pedesaan dengan basis komoditas sayuran terdapat kecenderungan semakin besar tingkat penganggurannya. Kontribusi di sektor pertanian sebenarnya lebih banyak ditopang oleh besarnya angkatan kerja yang bekerja. Sementara tingkat partisipasi kerja di pedesaan berbasis sayuran ada tendensi penurunan. Kondisi yang demikian tentu perlu mendapat perhatian, bahwa prosentase tingkat partisipasi kerja yang menurun setidaknya akan berimplikasi terhadap semakin tingginya angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana dalam Arung Lamba. *Kondisi Sektor Informal Perkotaan dalam Perekonomian Jayapura-Papua*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Thn. 16, No. 2, Juli 2011; Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih.
- Edy Priyono. *Situasi Ketenaga-kerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum*. Jurnal Analisis Sosial Vol. 7, No. 1, Februari 2002
- Fadilah dalam Anggiat Sinaga. *Analisis Tenaga Kerja Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Tenaga Kerja*. QE Journal Vol.02 - No.01 – 19; Universitas Negeri Medan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1997. *Tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan*
- Guus Heerma van Voss. 2012. *Kesepakatan atau Perjanjian Kerja dalam Agusmidah dkk*. Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia. Pustaka Larasan. Jakarta. Universitas Indonesia. Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Haslinah. 2011. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Wanita dan Produktivitas Pada Pengolahan Pasca Panen Sektor Pertanian Di Kabupaten Pinrang*. Jurnal ILTEK, Volume 6, Nomor 12. Fak. Teknik Universitas Islam Makassar
- Kamaluddin, R. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Manning, C. (2001) dalam Arung Lamba. *Kondisi Sektor Informal Perkotaan dalam Perekonomian Jayapura-Papua*. Jurnal Ekonomi Bisnis; Thn. 16, No. 2, Juli 2011; Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih
- M. Yacob Surung dan Dahlan, P. *Petani Padi Sawah dan Kemiskinan; Studi Kasus di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa*. Jurnal Agrisistem, Juni 2012, Vol. 8 No. 1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa,

- Nurmanaf, A.R. 2001. *An Analysis of Economic Inequalities Between Household in Rural Indonesia*. Dissertation Findings in Brief. Faculty of Business and Computing, Southern Cross University, Coffs Harbour Campus, Australia.
- Nurmanaf, A.R. 2002. *Peranan Sektor Non Pertanian Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Berlahan Sempit*. Icaserd Working Paper. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor.
- Rusastra, I W., K.M. Noekman, Supriyati, E. Suryani, M. Suryadi dan R. Elizabeth. 2005. *Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor.
- Supadi dan Susilowati. 2004. *Dinamika Penguasaan Lahan Pertanian Di Indonesia*. Icaserd Working Paper No.41. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor.
- Suryaningsih. 2011. *Peluang Kerja dan Migrasi Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Jurnal Fisip Umrah Vol. 2, No. 2, 201 – 212.
- Waluyo, dalam M. Yacob Surung dan Dahlan. 2012. *Petani Padi Sawah dan Kemiskinan; Studi Kasus di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa*. Jurnal Agrisistem, Vol. 8 No. 1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa.
- Wirosuhardjo, dalam Nining Purnamaningsih. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Kediri)*. Jurnal Ilmiah Berkala Universitas Kediri.